

Ikhtisar Webinar

# Tilik Tahun Kedua Jokowi-Ma'ruf Amin



## Tilik Tahun Kedua Jokowi-Ma'ruf Amin

17 Oktober 2021 | 14.00-16.00 WIB

Webinar bertajuk Tilik Tahun Kedua Jokowi-Ma'ruf Amin dimoderatori oleh Indah Lestari dan dibuka oleh Andi Wijayanto. Diskusi daring ini menghadirkan narasumber, yaitu: (1) Iis Gindarsah dan (2) Reyhan Noor yang mewakili tim pengkaji Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45); (4) Nur Hidayat sebagai Wartawan dan Redaktur Pelaksana Majalah Gatra; (5) Yunarto Wijaya sebagai Direktur Eksekutif Charta Politika; serta (6) Profesor Vedi Hadiz dari Pusat Studi Asia Universitas Melbourne. Tiga nama terakhir berperan sebagai penanggung atas laporan penelitian yang berjudul "Dinamika Isu dan Pola Sentimen Dalam Pemberitaan Daring dan Percakapan Warga Net."

Iis Gindarsah memaparkan temuan-temuan utama penelitian yang telah mengobservasi pemberitaan media daring pada periode 1 Oktober 2020 sampai akhir September 2021. Pantauan tersebut dikategorisasikan ke dalam 4 klaster (Politik Keamanan, Ekonomi Politik, Isu Perempuan, dan Orang Muda) yang memuat 37 topik dengan total 206 isu. Maha data memperlihatkan bahwa agregat pemberitaan terkait politik keamanan dan ekonomi politik cukup besar dibandingkan dengan dua klaster lainnya. Namun secara sentimen, klaster politik keamanan dan perempuan didominasi oleh sentimen negatif (*noise*), sedangkan klaster ekonomi dan orang muda lebih menunjukkan sentimen positif (*soundbite*). Secara keseluruhan, pemberitaan *noise* ditemukan lebih banyak dari *soundbite*, dengan lonjakan eksposur pemberitaan pertama terjadi pada bulan Oktober 2020 terkait isu Omnibus Law, diikuti oleh lonjakan berikutnya di Maret 2021 saat terjadi konflik terkait Partai Demokrat. Di samping pemberitaan media daring, observasi pola percakapan di media sosial juga menemukan titik kulminasi sejenis dengan sentimen yang cenderung negatif. Percakapan berupa *noise* terkait Omnibus Law sangat mendominasi media sosial di akhir tahun 2020. Sementara itu, media sosial hingga bulan Oktober 2021 konsisten diwarnai oleh percakapan mengenai korupsi.

Reyhan Noor kemudian melanjutkan paparan penelitian menggunakan tabulasi silang data berdasarkan temuan percakapan media sosial dan pemberitaan daring. Pertama, hasil tabulasi silang data antarklaster menunjukkan pemberitaan media

daring yang terekam sebagai *soundbite* di klaster politik keamanan dan perempuan cenderung memiliki korelasi yang relatif lebih tinggi terhadap pantauan media sosial daripada klaster lainnya. Di sisi lain, pemberitaan *noise* pada klaster ekonomi dan orang muda cenderung memiliki korelasi yang relatif lebih tinggi terhadap media sosial daripada klaster lainnya. Tingginya *noise* kedua klaster tersebut terjadi pada bulan Oktober 2020 akibat isu pengesahan UU Cipta Kerja yang kongruen dengan eksposur yang memuncak di media sosial pada waktu yang sama.

Analisis pemberitaan *soundbite* dari politik keamanan juga disilang dengan survei konsumen Bank Indonesia memperlihatkan korelasi yang cenderung lebih tinggi pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini daripada Indeks Keyakinan Konsumen. Hal ini menunjukkan pemberitaan positif media daring politik keamanan lebih dapat menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi secara umum daripada keyakinan masyarakat sebagai konsumen individu. Temuan lain dari analisis silang data ini adalah masyarakat Indonesia relatif optimis terhadap kondisi perekonomian di masa depan meskipun temuan tabulasi silang data tidak menunjukkan adanya pengaruh pemberitaan politik keamanan di media daring terhadap indeks tersebut. Lebih lanjut, analisis silang data dilakukan terhadap indikator keuangan dan makroekonomi. Terdapat anomali dari hasil silang data pemberitaan *soundbite* politik keamanan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana peningkatan eksposur pemberitaan positif justru terasosiasi dengan data nilai tukar yang melemah. Idealnya, pemberitaan positif politik keamanan di media daring seharusnya memberikan sinyal positif atas stabilitas kondisi domestik dan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap Indonesia, sehingga nilai tukar rupiah seharusnya menguat. Salah satu dugaan penyebab anomali tersebut adalah sentimen eksternal yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap pergerakan nilai tukar, seperti yang terjadi pada bulan April 2021 di mana pelemahan nilai tukar terasosiasi dengan pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang lebih cepat dari perkiraan.

Temuan lain dari analisis silang data terhadap kinerja keuangan adalah tidak adanya hubungan antara eksposur proporsi *soundbite* politik keamanan terhadap kinerja pasar modal. Analisis silang data terhadap indikator makroekonomi menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara pemberitaan *soundbite* politik keamanan

di media daring dan tingkat pertumbuhan ekonomi serta kinerja sektor manufaktur. Anomali justru ditemukan pada silang data terhadap tingkat inflasi, di mana peningkatan proporsi *soundbite* pemberitaan polkam seharusnya mampu memberikan rasa aman agar masyarakat percaya diri untuk melakukan belanja sehingga tingkat inflasi meningkat. Namun, analisis menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara kedua variabel tersebut. Dalam menutup paparan, Reyhan juga menyampaikan beberapa keterbatasan dari penelitian yang dilakukan. *Pertama*, basis data pemberitaan media daring yang digunakan hanya mencakup pemberitaan politik keamanan sehingga tidak bisa melihat hubungan pemberitaan media daring secara umum, terutama berita masuk ke dalam kluster ekonomi politik. *Kedua*, analisis yang dilakukan belum bersifat final dalam menilai kinerja pemerintahan tahun kedua karena masih harus menunggu beberapa data kuartal ketiga yang belum dirilis.

Terhadap presentasi laporan penelitian tersebut, Nur Hidayat memberikan sejumlah komentar dan pandangan alternatif melalui perspektif jurnalistik. Nur melihat bahwa sudah sewajarnya isu ekonomi mengalami kecenderungan *soundbite* yang lebih tinggi dengan melibatkan faktor dan data yang keras dibandingkan berita non-ekonomi seperti politik keamanan yang lebih rentan terhadap multitafsir. Terlebih lagi, Nur menekankan pentingnya prinsip *cover both sides* sebagai dasar yang menentukan kualitas objektivitas sebuah berita dalam media daring. Tentu bersama tantangan yang ada, penerapan prinsip ini dipersulit dengan keberadaan para jurnalis yang tergolong di bawah standar dan tidak memiliki sertifikasi sehingga butuh pisau analisa yang tajam dengan prinsip kewaspadaan dalam mengkaji media. Nur juga mengingatkan bahwa diksi dalam media sering kali menggunakan kata kiasan sehingga berpengaruh pada nada-nada pemberitaan.

Menurut Prof. Vedi Hadiz, kajian yang dilakukan oleh LAB 45 perlu lebih memperhatikan target audiensi sehingga dapat dibentuk sesuai kebutuhan yang ada. Selain itu, Prof. Vedi juga menekankan pentingnya dibentuk pola perkembangan dan kesimpulan berdasarkan temuan data-data agar penelitian dapat melampaui tahap deskriptif hingga ke tahap analisa. Walaupun menghargai kompleksitas penemuan data penelitian, beliau juga menyatakan pentingnya penjelasan dari anomali yang dipaparkan bersama dengan metodologi yang digunakan hingga dapat melahirkan kategorisasi kluster dari percakapan media sosial dan pemberitaan daring. Prof. Vedi

mengutarakan kecenderungan media daring yang tidak independen dan berbasis keuntungan sehingga terdapat asumsi dan bias yang sangat mempengaruhi data, terutama dengan pembentukan opini massal yang kini terjadi di media sosial. Dengan demikian, perlu diperhatikan aparat dan infrastruktur propaganda dari sisi pemerintah dan anti-pemerintah yang mempengaruhi apa yang muncul dan tidak muncul dalam media sosial bersama sentimennya. Prof. Vedi mengakhiri tanggapannya dengan imbauan agar berhati-hati dalam memaparkan persepsi dan realitas.

Yunarto Wijaya menanggapi bahwa sulit untuk merumuskan indikator absolut dalam metode kuantitatif guna memperlihatkan seberapa jauh realitas tercermin. Berbeda dengan ilmu survei, Yunarto mengharapkan pembahasan penelitian lebih dibumikan agar meneguhkan objektivitas dan tidak terjadi bias atas interpretasi para wartawan. Di samping itu, representasi data perlu diperhatikan agar lebih merefleksikan populasi Indonesia dan lebih mengetahui seberapa besar makna penelitian dalam menggambarkan realitas. Jangkauan penetrasi media dalam konteks *views* dan audiensi di media daring juga perlu dikaji sehingga dapat memperlihatkan apakah sudah melampaui media konvensional dan kepercayaan publik yang terbentuk. Secara implisit, Yunarto melihat seolah terdapat pembenaran dari anggapan fokus Jokowi ke arah ekonomi dikarenakan tendensi *soundbite* ke arah ekonomi dibandingkan politik keamanan. Mengakhiri tanggapannya, Yunarto mengharapkan rilis data layaknya hasil penelitian ini dalam kurun 3 bulan sekali. Namun, paparan tersebut diusulkan agar memiliki variabel yang lebih kaya dikarenakan empat variabel yang ada dinilai terlalu simpel dalam menggambarkan rezim periode kedua Jokowi.

Terhadap ketiga penanggap, Iis Gindarsah merespons dengan mengakui bahwa kajian *big data* mengalami tantangan kebutuhan analisis *parsimony* atas jumlah data yang banyak sehingga terdapat konteks yang perlu disimplifikasi. Sedangkan dalam segi metodologi penentuan 4 klaster analisis, penelitian sebelumnya telah melakukan survei ahli pada pengamat politik dan sosial beserta perilaku media yang kerap diangkat. Usai ditentukan, klaster dibagi menjadi sub-kategori dengan tiga lapisan yang dalam. Oleh karena itu, kompleksitas teknik yang dihadapi para analis *big data* kembali pada kebutuhan *parsimony analysis*. Kemudian dalam hal kesimpulan,

penelitian memang masih berada pada tahap awal sehingga mengharapkan masukan dari para ahli dan penanggap yang hadir untuk memperkaya penelitian.

Pada sesi tanya jawab, Indah Lestari mencatat cukup banyak pertanyaan dari para peserta diskusi. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah jika dihadapkan dengan hasil survei kepercayaan publik, bagaimana membandingkan fokus yang belum terkejar dari analisis maha data media dengan kondisi nyata pemerintahan dan dampak politiknya terhadap presiden Jokowi. Hal ini tentu saja dalam kaitannya dengan prioritas pemerintah dalam tiga tahun ke depan. Di samping itu, juga terdapat pertanyaan tentang penyebab dari tangkapan *big-data* yang mengakibatkan friksi Partai Demokrat menjari puncak eksposur pada klaster politik keamanan.

Tanggapan dimulai dari Prof. Vedi yang memaparkan bahwa kategorisasi yang telah dibentuk cenderung membuat hal-hal penting tidak mencuat, sehingga terdapat perbedaan antar persepsi dan realitas. Beberapa isu yang tidak terangkat adalah kesenjangan sosial, mobilisasi sosial terbatas, kematian para tenaga kesehatan, kesulitan pekerjaan bagi kaum miskin, hingga peran perempuan dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu, Prof. Vedi beranggapan bahwa fokus yang perlu diselesaikan pemerintah ke depan merupakan korupsi, kesenjangan sosial, dan kesehatan. Sementara itu, Nur juga menambahkan bahwa gambaran kondisi sosial dan politik yang didapatkan melalui media belum tentu mendasari berita daring yang memenuhi standar jurnalistik. Harapannya, penerapan prinsip *cover both sides* dan dipaparkannya *viewer discretion* dari lembaga-lembaga riset tetap dipastikan ada. Kemudian Nur juga menekankan bahwa isu pendidikan seharusnya fokus yang penting bagi pemerintah ke depan.

Lebih spesifik terkait survei opini publik, Yunarto menunjukkan adanya *gap* antar temuan media melalui *big data* dan hasil lembaga survei karena ada kesulitan untuk mengidentifikasi kesahihan dari sebuah konten media. Namun, keduanya sama-sama melalui batasan interpretasi yang rentan terhadap bias dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah dikhawatirkan terlalu adaptif dalam memprioritaskan isu paling aktual dan paling viral karena dianggap merepresentasikan kelas menengah yang mayoritas. Alhasil, fokus komunikasi politik akan sekedar persuasif dan/atau manipulatif melalui *buzzer* dan *framing*. Yunarto mengingatkan bahwa survei hanyalah merupakan cerminan terhadap persepsi publik dan bukan merupakan cerminan

realitas secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan adanya standardisasi untuk membuat hasil yang dapat diandalkan. Terkait urgensi fokus pemerintah untuk tiga tahun ke depan, Yunarto menegaskan bahwa penegakkan hukum, terutama bagi kelas menengah, menjadi penting. Terlebih lagi, konteks pendidikan dan kesenjangan sosial juga signifikan untuk difokuskan oleh pemerintah.

Dalam menjawab pertanyaan terkait fraksi demokrat dalam puncak eksposur data politik keamanan, tim peneliti LAB 45 melalui salah satu analisisnya, Reine Prihandoko, menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan di media massa untuk tidak memunculkan konten-konten dalam vakum politik sosial, melainkan hanya menunjukkan konten viral. Mengingat bahwa dalam perihal partai demokrat terdapat dua kubu oposisi, ditambah pula dengan keberadaan *buzzer*, lonjakan pemberitaan seputar friksi ini terjustifikasi sebagai akibat dari perlombaan penanaman ide, terutama dikarenakan isu-isu kontroversial yang diperdebatkan oleh partai Demokrat. Untuk menutup webinar, Iis Gindarsah berpendapat bahwa pemerintah harus memprioritaskan topik yang menimbulkan friksi politik dan nuansa *noise* seperti pemberantasan korupsi dan kebebasan berpendapat selama tiga tahun ke depan, sesuai dengan hasil pemetaan grafik kuadran penelitian LAB 45.



Jl. Mabas Hankam No. T65,  
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Minggu, 17 Oktober  
2021

➔ +62 812 8218 4545

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id